



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN TAHUN 2024
(RENJA PERUBAHAN 2024 – SKPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**DPMPTSP
KABUPATEN TAPIN
2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Pertimbangan.....	2
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP sampai dengan Triwulan II	
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2023.....	7
B. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Januari Tahun 2024 s.d Juni Tahun 202	5
BAB III Rencana Program dan Kegiatan dalam perubahan Renja DPMPTS	
A. Kegiatan Lanjutan Tahun Sebelumnya	18
B. Pergeseran dan Penghapusan Kegiatan Tahun 2023	18
BAB IV PENUTUP.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin akurasi kegiatan SKPD berjalan secara efektif dan efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan maka diperlukan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapin dapat memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan DPMPTSP tahun 2024 maka perlu dilakukan Perubahan karena berdasarkan hasil evaluasi dalam tahun berjalan sampai dengan Triwulan I menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain :

1. Terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah
2. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

DPMPTSP sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tapin di bidang Pelayanan Publik daerah, maka dengan sendirinya DPMPTSP mengemban tugas dan tanggung jawab agar pelayanan publik di Kabupaten Tapin dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan efisien sehingga dapat mengarah pada visi, misi Kabupaten Tapin seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Untuk mencapai strategi tersebut DPMPTSP dituntut mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan 2024 adalah sebagai pedoman pedoman arah kerja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin. Kebijakan, program dan kegiatan disesuaikan antara

program daerah, provinsi dan nasional sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien.

Adapun dasar disusunnya Renja Perubahan adalah :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan sehingga program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tapin dan Renstra DPMPTSP;
2. Agar program/kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan;
3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab;
4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumberdaya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerja.

C. Dasar Pertimbangan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja perubahan SKPD Tahun 2024 adalah :

1. Undang undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomo 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014,

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);
5. Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6139);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6123);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lem,baran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 187, Lembaran Negara Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6841);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasin Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 – 2025 Nomor 17, (Tambahan Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
28. Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (120);
29. Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2042 (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
36. Peraturan Bu[ati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
37. Peraturan Bu[ati Tapin Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 19);

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Perubahan DPMPSTSP Kabupaten Tapin tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Pertimbangan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPSTSP Tahun 2023
- B. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPSTSP Tahun 2024 s.d Triwulan II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD

- A. Kegiatan Lanjutan tahun sebelumnya
- B. Pergeseran dan Penghapusan Kegiatan Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2023

Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis yang tercantum dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2018-2023 adalah :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya peran investasi daerah dalam pembangunan perekonomian	Nilai Investasi (Milyar Rp) <u>Investasi PMA/PMDN Thn n – Investasi PMA/PMDN Thn n-1 x 100%</u> Investasi PMA/PMDN Thn n-1 <u>1.464,88 – 1.012,14 x 100%</u> 1.012,14	541 5%	1.464,88 44,73%
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan maupun Non Perizinan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perizinan	87	87,14
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76	76,15
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	65	28,2

B. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2024 s.d. Triwulan II

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program/kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berikut deskripsi pencapaian kinerja per program:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pencapaian kinerja keuangan sampai dengan Semester I Tahun 2024 Dengan total anggaran Rp. 5.347.677.815,- dan realisasi sebesar Rp. 2.545.378.393,- atau dengan ratio sebesar 47,59%

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pencapaian kinerja keuangan sampai dengan Semester I Tahun 2024 dengan total anggaran Rp. 494.356.100,- dan realisasi sebesar Rp. 9.200.000,- atau dengan ratio sebesar 1,86%

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pencapaian kinerja keuangan sampai dengan Semester I Tahun 2024 dengan total anggaran Rp. 142.241.000,- dan realisasi sebesar Rp. 47.736.000,- atau dengan ratio sebesar 32,86%

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pencapaian kinerja keuangan sampai dengan Semester I Tahun 2024 total anggaran Rp. 713.330.490,- dan realisasi sebesar Rp. 131.946.900,- atau dengan ratio sebesar 18,50%

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pencapaian kinerja keuangan sampai dengan Semester I Tahun 2024 total anggaran Rp. 617.004.000,- dan realisasi sebesar Rp. 168.824.800,- atau dengan ratio sebesar 27,36%

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pencapaian kinerja keuangan sampai dengan Semester I Tahun 2024 total anggaran Rp. 52.363.500,- dan realisasi sebesar Rp. 18.000.000,- atau dengan ratio sebesar 34,38%

Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 s.d Semester I adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Nilai Investasi (Milyar)	1.530	1.271,85
Persentase Peningkatan Pertumbuhan Investasi (%)	5	-
		*(Belum dapat dihitung)

INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan maupun Non Perizinan (Poin)	87	- * (Belum dapat dihitung)
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	79,70
Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	65	- * (Belum dapat dihitung)

Selanjutnya untuk memberikan gambaran lebih rinci terkait evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 KABUPATEN TAPIN

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TAPIN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2024 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
									Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)									(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	18	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Meningkatkan capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), terdiri : - Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja) - Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja) - Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja) - Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja) 2. Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti 3. Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90% Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	1. Terdiri : - 23,90 - 23,90 - 12,25 - 16,95 2. 100 % 3. 100 % 4. 85 %	-	1. Terdiri : - 23,90 - 23,90 - 12,25 - 16,95 2. 100 % 3. 100 % 4. 85 %	1. Terdiri : - 23,70 - 24,00 - 12,00 - 20,00 2. 100 % 3. 0 % 4. 0 %	1. 113% 2. 100% 3. 0% 4. 0%	1. 113% 2. 100% 3. 0% 4. 0%	1. 113% 2. 100% 3. 0% 4. 0%
2	18	1	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang 2. Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti 3. Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	1. 100% 2. 100% 3. 100%	-	1. 100% 2. 100% 3. 100%	1. 100% 2. 100% 3. 100%	1. 100% 2. 100% 3. 100%	1. 100% 2. 100% 3. 100%	1. 100% 2. 100% 3. 100%

2	18	1	2	01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	19	11	8	54%	8	8
2	18	1	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)</i>	100%	-	100%	50%	50%	50%	50%
2	18	1	2	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	-	15	15	50%	50%	50%
2	18	1	2	02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2	-	2	2	50%	2	2
2	18	1	2	06		Administrasi umum perangkat Daerah	<i>Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik</i>	100%	-	100%	50%	50%	50%	50%
2	18	1	2	06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	-	12	6	50%	6	6
2	18	1	2	06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	-	1	0	0%	0	0
2	18	1	2	06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	-	12	6	50%	6	6
2	18	1	2	06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	-	12	6	50%	6	6
2	18	1	2	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	-	12	6	50%	6	6
2	18	1	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik</i>	100	-	100	0	0%	0	0%
2	18	1	2	07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25	254	25	0	0%	0	0

2	18	1	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	-	1	0	0%	0	0
2	18	1	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik</i>	100%	-	100%	50%	50%	50%	50%
2	18	1	2	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	-	12	6	50%	6	6
2	18	1	2	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4	-	4	0	0%	0	0
2	18	1	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik</i>	90	-	90	0	0%	0	0
2	18	1	2	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	-	9	9	100%	9	9
2	18	1	2	09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	-	25	25	100%	25	25
2	18	1	2	09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	-	5	5	100%	5	5
2	18	2				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Jumlah UMKM yang Bermitra dengan Perusahaan Besar 2. Persentase Potensi unggulan daerah yang akan dipromosikan 3. Jumlah naskah akademik yang terselesaikan	1. 4 2. 100% 3. 1	-	1. 4 2. 100% 3. 1	1. 4 2. 100% 3. 0	1. 75% 2. 100% 3. 0%	1. 3 2. 100% 3. 0	1. 3 2. 100% 3. 0
2	18	2	2	01		Penetapan Pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1. Persentase usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mengajukan proposal kemitraan yang disetujui 2. Jumlah sosialisasi fasilitas kemitraan yang sesuai ketentuan 3. Jumlah koordinasi peluang kemitraan yang dilaksanakan 4. Persentase UMKN yang difasilitasi	1. 100% 2. 2 3. 5 4. 100%	-	1. 100% 2. 2 3. 5 4. 100%	1. 100% 2. 0 3. 3 4. 50%	1. 100% 2. 0% 3. 60% 4. 50%	1. 100% 2. 0 3. 3 4. 50%	1. 100% 2. 0 3. 3 4. 50%

						Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dok)	1	-	1	0	0%	0	0
						Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	4	-	4	3	75%	3	3
2	18	2	2	02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1. Persentase data peluang potensi unggulan dalam perencanaan penanaman modal yang memenuhi standarisasi 2. Persentase dokumen kajian potensi unggulan dalam perencanaan penanaman modal yang sesuai ketentuan 3. Persentase dokumen potensi unggulan daerah yang baik	1. 100% 2. 100% 3. 100%	-	1. 100% 2. 100% 3. 100%	1. 0% 2. 0% 3. 0%			
2	18	2	2	02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	-	1	0	0%	0	0
2	18	3				Program Promosi Penanaman Modal	1. Persentase promosi penanaman modal yang sesuai ketentuan 2. Persentase SDM promosi investasi daerah yang bersertifikat	1. 100% 2. 100%	-	1. 100% 2. 100%				
2	18	3	2	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Media Promosi Penanaman Modal yang baik 2. Jumlah pemetaan media promosi yang tersusun 3. Persentase UMKN yang difasilitasi	1. 100 2. 4 3. 100	-	1. 100% 2. 4 3. 100	1. 100% 2. 2 3. 50%	1. 100% 2. 50% 3. 50%	1. 100% 2. 2 3. 50%	1. 100% 2. 2 3. 50%
2	18	3	2	01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	-	2	1	50%	1	1
2	18	4				Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Persentase penerbitan perizinan yang berbasis elektronik sesuai ketentuan 2. Persentase SDM teknis dan non teknis yang kompeten	1. 75% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100% 6. 100%	-	1. 75% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100% 6. 100%	1. 70,35% 2. 0% 3. 80% 4. 100% 5. 100% 6. 100%			

							3. Persentase sinkronisasi perizinan daerah 4. Persentase penyebaran informasi pelayanan publik yang dipenuhi 5. Persentase realisasi tindakan lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6. Persentase data pengaduan pelayanan publik yang ditindaklanjuti								
2	18	4	2	01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase layanan perizinan yang berbasis elektronik 2. Persentase informasi layanan perizinan berbasis elektronik yang tersedia 3. Persentase layanan berbantuan (helpdesk) perizinan yang dipenuhi 4. Persentase SDM yang mengikuti Bimbingan teknis/ Pelatihan 5. Persentase Koordinasi permasalahan yang Terkait Pelaksanaan Perizinan di Daerah 6. Persentase Kebijakan Pusat dan Daerah yang Terkait Pelaksanaan Perizinan di Daerah yang Ditelaah 7. Jumlah monitoring evaluasi SKM 8. Persentase sarana pengaduan yang efektif 9. Jumlah monitoring tindakan lanjut pengaduan 10. Persentase pengaduan yang dikoordinasikan 11. Persentase data kebijakan pelayanan publik yang sesuai ketentuan 12. Jumlah media informasi kebijakan pelayanan publik yang tersedia 13. Jumlah monitoring evaluasi data kebijakan pelayanan publik	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100% 6. 100% 7. 4 8. 100% 9. 4 10. 100% 11. 100% 12. 3 13. 4	-	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100% 6. 100% 7. 4 8. 100% 9. 4 10. 100% 11. 100% 12. 3 13. 4	1. 66.66% 2. 50% 3. 100% 4. 0% 5. 80% 6. 100 7. 2 8. 100% 9. 2 10. 100% 11. 100% 12. 100% 13. 50%	1. 66.66% 2. 50% 3. 100% 4. 0% 5. 80% 6. 100 7. 50% 8. 100% 9. 50% 10. 100% 11. 100% 12. 100% 13. 50%	1. 66.66% 2. 50% 3. 100% 4. 0% 5. 80% 6. 100% 7. 2 8. 50% 9. 2 10. 100% 11. 100% 12. 3 13. 2		
2	18	4	2	01	1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan	1500	-	1500	960	64%	960	960	

							Merealisasikan Kegiatan Usahanya										
2	18	5	2	01	3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah di analisa dan diverifikasi Data, Profil, dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi	42	-	42	10	23,81%	10	10			
2	18	6				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Tapin	80%	-	80%	50%	62,5%	50%	50%			
2	18	6	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data pengawasan pelaku usaha yang tersedia	100%	-	100%	83%	83%	83%	83%			
2	18	6	2	01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	-	12	6	50%	6	6			

Sumber : Data diolah dari Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD DPMPTSP s/d Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan data hasil evaluasi Renja DPMPTSP sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebagian besar terlaksana sesuai dengan Output (keluaran) dari kegiatan yang telah ditetapkan dan jika dilihat dari sisi serapan anggaran dan realisasi kinerja renja sampai dengan triwulan II ada beberapa kegiatan yang masih belum optimal dalam pelaksanaannya namun hal tersebut lebih dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan yg baru akan dilaksanakan setelah Triwulan II pada tahun berjalan sesuai dengan perencanaan yg telah disusun oleh pelaksana kegiatan.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DPMPSTSP

Realisasi dari program kerja pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II tersebut pada Bab II sebelumnya memberikan bahan analisis terhadap beberapa program kerja yang sekiranya akan rendah realisasi pencapaian target dan anggarannya, jika dibiarkan walaupun pencapaian fisik dapat 100% namun anggaran tidak akan terserap seluruhnya. Atau kemungkinan adalah dengan anggaran yang sudah ada akan menghambat pencapaian target fisiknya. Berdasarkan pertimbangan itulah maka agar optimal dalam pencapaian target perlu diadakan penambahan anggaran dengan mengambil dari pagu anggaran program kerja lain yang sudah optimal target fisiknya. Selain itu juga mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat dan kualitas program / kegiatan yang direncanakan, maka perlu adanya pengurangan atau perampingan anggaran.

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan pada tahun anggaran 2024 ini meliputi:

A. Kegiatan Lanjutan Tahun Sebelumnya

Semua program dan kegiatan merupakan program dan kegiatan pada tahun 2024 merupakan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri 90, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

B. Pergeseran dan Penghapusan Kegiatan Tahun 2024

Beberapa kegiatan yang mengalami pengurangan besaran anggarannya dan di sisi lain mengalami kenaikan tergantung dari kebutuhan dengan mengingat efisiensi anggaran yang ada, antara lain terdapat pada:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - a. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp. 139.291.400,- dan setelah perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 156.141.400,-
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan Rp. 3.348.860.152,- dan setelah perubahan bertambah jadi sebesar Rp. 3.349.013.840,-
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD Rp. 88.969.000,- setelah tetap sebesar Rp. 88.969.000,-
- 1.3. Administrasi Umum Perangkat daerah
- b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sebelum perubahan alokasi dana sebesar Rp. 169.386.300,- dan setelah perubahan tetap sebesar Rp. 169.386.300,-
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor sebelum perubahan alokasi dana sebesar Rp. 179.869.500,- dan setelah perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 191.492.200,-
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebelum perubahan alokasi dana sebesar Rp. 16.383.000,- dan setelah perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 21.438.000,-
 - e. Penyediaan bahan / material sebelum perubahan dana yang disediakan sebesar Rp. 53.529.500,- dan setelah perubahan tetap sebesar Rp. 53.529.500,-
 - f. Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKDP sebelum perubahan alokasi dana sebesar Rp. 453.298.000,- dan setelah perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 958.172.000,-
- 1.4. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan peralatan dan mesin sebelum perubahan sebesar Rp. 79.205.500,- setelah perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 82.455.500,-
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Rp. 9.534.600,- setelah perubahan tetap sebesar Rp. 9.534.600,-
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Sebelum perubahan alokasi dana sebesar Rp. 246.346.800,- dan setelah perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 256.001.700,-,
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp. 263.164.160,- dan setelah perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 268.879.520,-
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan Rp. 99.326.438,- setelah perubahan tetap sebesar Rp. 99.326.438,-
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Rp. 24.113.465,- dan setelah perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 28.967.967,-
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Rp. 176.400.000,- setelah perubahan berkurang menjadi sebesar Rp. 146.412.000,-
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 2.1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tapin
 - a. Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal Rp. 178.050.320,- setelah perubahan berkurang jadi sebesar Rp. 150.703.500,-
 - b. Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko Rp. 74.872.150,- setelah perubahan tetap sebesar Rp. 74.872.150,-
 - 2.2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan peta potensi investasi Kabupaten/Kota Rp. 241.433.630,- setelah perubahan berkurang jadi sebesar Rp. 234.748.700,-
3. Program Promosi Penanaman Modal
 - 3.1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota Rp. 142.241.000,- setelah perubahan tetap sebesar Rp. 142.241.000,-
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 4.1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik Rp. 339.108.000,- setelah perubahan berkurang menjadi sebesar Rp. 299.628.000,-

- b. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko Rp. 156.617.980,- setelah perubahan berkurang menjadi sebesar Rp. 137.149.580,-
 - c. Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko Rp. 215.604.510,- setelah perubahan tetap sebesar Rp. 215.604.510,-
- 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 5.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya Rp. 96.434.000,- setelah perubahan berkurang menjadi sebesar Rp. 86.634.000,-
 - b. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha Rp. 318.066.000,- setelah perubahan tetap sebesar Rp. 318.066.000,-
 - c. Pengawasan penanaman modal Rp. 202.484.000,- setelah perubahan tetap sebesar Rp. 202.484.000,-
- 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - 6.1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pengelolaan, penyajian pemanfaatan data dan informasi perzinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Rp. 52.363.500,- setelah perubahan tetap sebesar Rp. 52.363.500,-

Pergeseran dan perubahan kegiatan secara rinci atau perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan agar dapat diketahui dengan jelas secara kuantitatif anggarannya.

Penyajian tabel Renja perubahan secara sederhana dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Tapin
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024 (tahun berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2025		Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif					
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan					a/b/c	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=12-11	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
2	18	1																			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%) 2. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%) 3. Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	1. Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah) terdiri : - Nilai komponen AKIP (Perencanaan Kinerja) - Nilai komponen AKIP (Pengukuran Kinerja) - Nilai komponen AKIP (Pelaporan Kinerja) - Nilai komponen AKIP (Evaluasi Kinerja) 2. Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti 3. Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90% 4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	100% 100%	100%	1. Terdiri : -24,00 - 24,00 - 12,50 - 20,00 2.100 % 3.100 % 4. 85 %	5.347.677.815	5.879.719.965	532.042.150	APBD	APBD	100%	14.078.646.794	b	DPMPTSP
2	18	1	2	01																	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang 2.Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjut 3.Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	100%	1.100 2.100 3.100	139.291.400	156.141.400	16.850.000	APBD	APBD	100%	75.000.000	b	DPMPTSP	
2	18	1	2	01	6																
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Kinerja sesuai ketentuan (buah)	1.Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (bin) 2.Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	11 Dok	1. 12 2. 11	139.291.400	156.141.400	16.850.000	APBD	APBD	11 Dok	75.000.000	b	DPMPTSP	

2	18	1	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 3. Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan 2. Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	1.1 Paket 1 2. 3.1 Paket	1. 100 % 2. 100%	3.437.829.152	3.437.982.840	153.688	APBD	APBD	100%	3.409.996.794	b	DPMPTSP	
2	18	1	2	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	15 ORG	15	3.348.860.152	3.349.013.840	153.688	APBD	APBD	15 ORG	3.334.996.794	b	DPMPTSP
2	18	1	2	02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala (buah)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	2 Dok	2	88.969.000	88.969.000	-	APBD	APBD	3 Dok	75.000.000	b	DPMPTSP
2	18	1	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 2. Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Tersedianya Bahan/Material 6. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	1.1 Paket 1 2. 3.1 Paket	100%	872.466.300	1.394.018.000	521.551.700	APBD	APBD	100%	1.975.000.000	b	DPMPTSP	
2	18	1	2	06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bln	12	169.386.300	169.386.300	-	APBD	APBD	12	350.000.000	b	DPMPTSP
2	18	1	2	06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bln	1	179.869.500	191.492.200	11.622.700	APBD	APBD	1	250.000.000	b	DPMPTSP
2	18	1	2	06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bln	12	16.383.000	21.438.000	5.055.000	APBD	APBD	12	50.000.000	b	DPMPTSP
2	18	1	2	06	7	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bln	12	53.529.500	53.529.500	-	APBD	APBD	12	300.000.000	b	DPMPTSP
2	18	1	2	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bln	12	453.298.000	958.172.000	504.874.000	APBD	APBD	12	1.025.000.000	b	DPMPTSP
2	18	1	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	1.1 Paket 1 2. 12 Bln	100%	88.740.100	91.990.100	3.250.000	APBD	APBD	1.1 Paket 1 2. 12 Bln	5.600.000.000	b	DPMPTSP	
2	18	1	2	07	8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	21 Unit	25	79.205.500	82.455.500	3.250.000	APBD	APBD	25	3.350.000.000	b	DPMPTSP
2	18	1	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	40 Unit	5	9.534.600	9.534.600	-	APBD	APBD	5	2.250.000.000	b	DPMPTSP

2	18	1	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	1. 1 Paket 2. 1 Paket 3. 12 Bln	100%	509.510.960	524.881.220	15.370.260	APBD	APBD	100%	750.000.000	b	DPMPTSP
2	18	1	2	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bln	12	246.346.800	256.001.700	9.654.900	APBD	APBD	12	450.000.000	b	DPMPTSP
2	18	1	2	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bln	4	263.164.160	268.879.520	5.715.360	APBD	APBD	5	300.000.000	b	DPMPTSP
2	18	1	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	1. 1 Paket 2. 1 Paket 3. 1 Paket	90%	299.839.903	274.706.405	(25.133.498)	APBD	APBD	100%	2.268.650.000	b	DPMPTSP
2	18	1	2	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bln	9	99.326.438	99.326.438	-	APBD	APBD	9	150.000.000	b	DPMPTSP
2	18	1	2	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bln	25	24.113.465	28.967.967	4.854.502	APBD	APBD	25	325.000.000	b	DPMPTSP
2	18	1	2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Masyarakat, Semua ASN	ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bln	5	176.400.000	146.412.000	(29.988.000)	APBD	APBD	5	1.793.650.000	b	DPMPTSP
2	18	2	2		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Persentase dokumen RUPM yang tersedia 2. Persentase rekomendasi PM	1. Jumlah UMKM yang Bermitra dengan Perusahaan Besar 2. Persentase Potensi unggulan daerah yang akan dipromosikan 3. Jumlah naskah akademik yang terselesaikan	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	100%	1.5 2.100 3.1	494.356.100	460.324.350	(34.031.750)	APBD	APBD	1.5 2.100 3.1	438.500.000	b	DPMPTSP
2	18	2	2	01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1. Persentase usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mengajukan proposal kemitraan yang disetujui 2. Jumlah sosialisasi fasilitas kemitraan yang sesuai ketentuan 3. Jumlah koordinasi peluang kemitraan yang dilaksanakan 4. Persentase UMKMN yang difasilitasi	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	1. 100 % 2. 100 %	1.100 2.2 3.5 4.100	252.922.470	225.575.650	(27.346.820)	APBD	APBD	1.100 2.2 3.5 4.100	313.500.000	b	DPMPTSP

2	18	2	2	101	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	-	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dok)	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	-	1	178.050.320	150.703.500	(27.346.820)	APBD	APBD	1	280.000.000	b	DPMPPTSP
2	18	2	2	102	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	-	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	-	5	74.872.150	74.872.150	-	APBD	APBD	5	33.500.000	b	DPMPPTSP
2	18	2	2	02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	1.Persentase data peluang potensi unggulan dalam perencanaan penanaman modal yang memenuhi standarisasi 2.Persentase dokumen kajian potensi unggulan dalam perencanaan penanaman modal yang sesuai ketentuan 3.Persentase dokumen potensi unggulan daerah yang baik	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	-	1.100 2.100 3.100	241.433.630	234.748.700	(6.684.930)	APBD	APBD	1.100 2.100 3.100	125.000.000	b	DPMPPTSP
2	18	2	2	02	Penyusunan peta potensi Investasi kabupaten/kota	Jumlah dokumen potensi investasi di Kabupaten Tapin	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	-	1 Buah	241.433.630	234.748.700	(6.684.930)	APBD	APBD	1 Buah	125.000.000	b	DPMPPTSP
2	18	3			Program Promosi Penanaman Modal	1. Persentase jenis investasi/promosi yang dipublikasikan 2. Persentase stakeholder yang menggunakan informasi/promosi investasi yang dipublikasikan	1.Persentase Promosi Penanaman Modal Yang Sesuai Ketentuan 2.Persentase SDM promosi investasi daerah yang bersertifikat	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	1.0% 2.100%	1.100 2.100	142.241.000	142.241.000	-	APBD	APBD	1.100 2.100	125.000.000	b	DPMPPTSP
2	18	3	2	01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.Persentase Media Promosi Penanaman Modal yang baik 2.Jumlah pemetaan media promosi yang tersusun 3. Jumlah SDM promosi yang mengikuti pelatihan	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	1. 100 2. 3	1.100% 2. 3 3. 5	142.241.000	142.241.000	-	APBD	APBD	100%	125.000.000	b	DPMPPTSP
2	18	3	2	01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung dalam kegiatan pameran investasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Buah	2 Buah	142.241.000	142.241.000	-	APBD	APBD	2 Buah	125.000.000	b	DPMPPTSP
2	18	4			Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Persentase perizinan yang diterbitkan 2. Persentase terlaksananya SOP Pelayanan	1.Persentase Penerbitan Perizinan Yang Berbasis Elektronik 2.Persentase SDM teknis dan non teknis yang kompeten 3.persentase sinkronisasi perizinan daerah 4. Persentase penyebaran informasi pelayanan publik yang dipenuhi 5. Persentase realisasi tindaklanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6. Persentase data pengaduan aatentang pelayanan publik yang	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	1. 100% 2. 100%	1.75 2.100 3.100 4.100 5.100 6.100	713.330.490	652.382.090	(60.948.400)	APBD	APBD	1.75 2.100 3.100 4.100 5.100 6.100	825.000.000	b	DPMPPTSP

						Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Terlaksananya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 2. Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 3. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1.Persentase Kebijakan Pusat dan Daerah yang Terkait Pelaksanaan Perizinan di Daerah yang Ditelaah 2.Persentase Koordinasi pemusabahan yang Terkait Pelaksanaan Perizinan di Daerah 3.Persentase Layanan Perizinan Yang Berbasis Elektronik 4.Persentase SDM yang mengikuti Bimbingan teknis/ Pelatihan yang bermanfaat 5.Persentase Informasi layanan perizinan berbasis elektronik yang tersedia 6.Persentase layanan berbarntarian (helpdesk) perizinan yang dipenuhi 7.Jumlah monitoring evaluasi SKM 8.Persentase sarana tindaklanjut pengaduan 9.Jumlah monitoring tindaklanjut pengaduan 10.Persentase pengaduan yang dikordinasikan 11.Persentase Data Kebijakan Pelayanan Publik yang sesuai ketentuan 12.Jumlah media informat kebijakan pelayanan publik yang tersedia 13. Jumlah monitoring evaluasi data kebijakan pelayanan publik	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	1. 1 Paket 2. 1 Paket 3. 1 Paket	1.100 2.100 3.100 4.100 5.100 6.100 7.4 8.100 9.4 10.100 11.100 12.3 13.4	713.330.490	652.382.090	(60.948.400)	APBD	APBD	1.100 2.100 3.100 4.100 5.100 6.100 7.4 8.100 9.4 10.100 11.100 12.3 13.4	825.000.000	b	DPMPTSP
2	18	4	2	01	1	Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah perizinan yang diterbitkan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	600	1500	339.108.000	299.628.000	(39.480.000)	APBD	APBD	1500	425.000.000	b	DPMPTSP
2	18	4	2	01	2	Pemantauan, Analisa, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha	Jumlah rapat koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemkab. Tapin	Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	12	1500	158.617.980	137.149.580	(21.468.400)	APBD	APBD	1500	290.000.000	b	DPMPTSP
2	18	4	2	01	3	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	-	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Pelayanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	10	10	215.604.510	215.604.510	-	APBD	APBD	10	110.000.000	b	DPMPTSP
2	18	5				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Persentase pelaku usaha yang memiliki izin 2. Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disetujui	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	1. 100% 2. 100%	100%	617.004.000	607.204.000	(9.800.000)	DAK Non Fisisk, APBD	DAK Non Fisisk, APBD	100%	185.000.000	b	DPMPTSP
2	18	5	2	01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1.Persentase pelaku usaha yang dibina menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) 2.Persentase peserta yang mendapatkan sosialisasi kegiatan penanaman modal (LKPM) yang lulus passing grade 3.Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi LKPM 4.Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang ditindak lanjuti Pelaku Usaha 5. Jumlah pelaku usaha yang diawasi 5.Persentase peserta yang mendapatkan sosialisasi kegiatan penanaman modal (LKPM) yang lulus passing grade	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	-	1. 100 2. 100 3. 100 4. 80 5. 42	617.004.000	607.204.000	(9.800.000)	DAK Non Fisisk, APBD	DAK Non Fisisk, APBD	1.100 2. 100 3. 100 4. 80 5. 42	185.000.000	b	DPMPTSP

2	18	5	2	01	1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Persentase pelaku usaha yang dipantau	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	100	30	96.434.000	86.634.000	(9.800.000)	DAK Non Fisisk, APBD	DAK Non Fisisk, APBD	33	45.000.000	b	DPMPPTSP
2	18	5	2	01	2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Persentase pelaku usaha yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	100	120	318.086.000	318.086.000	-	DAK Non Fisisk, APBD	DAK Non Fisisk, APBD	140	95.000.000	b	DPMPPTSP
2	18	5	2	01	3	Pengawasan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dari Pelaku Usaha dari Inspeksi Lapangan	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	100	42	202.484.000	202.484.000	-	DAK Non Fisisk	DAK Non Fisisk	45	45.000.000	b	DPMPPTSP
2	18	6				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Persentase Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Tapin	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	-	80%	52.363.500	52.363.500	-	APBD	APBD	100%	55.000.000	b	DPMPPTSP
2	18	6	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase data pengawasan pelaku usaha yang tersedia	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Paket	100%	52.363.500	52.363.500	-	APBD	APBD	100%	55.000.000	b	DPMPPTSP
2	18	6	2	01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah inventarisasi dan updating data penanaman modal, perizinan dan non perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Masyarakat, Semua ASN	ASN, Pelaku Usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	12 dokumen	12 dokumen	52.363.500	52.363.500	-	APBD	APBD	12 dokumen	55.000.000	b	DPMPPTSP
TOTAL																7.366.972.905	7.794.234.905	427.262.000			15.707.146.794		

Rantau, Juli 2024
KEPALA DPMPPTSP

Hj. FAUZIAH, S.Sos, M.AP
NIP. 19660107 198703 2 008

BAB IV

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP Tahun 2024 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan DPMPTSP, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam ***Rencana Kerja Perubahan*** SKPD DPMPTSP ini, kiranya dapat memberi arah bagi kegiatan pelayanan publik di Kabupaten Tapin yang lebih baik lagi.

Rantau, Juli 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

Muhammad Syarifuddin, M.Pd